

NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KAPITALISME

Ariza Fuadi

Prodi Ekonomi Syari'ah UNDIP Semarang

Email : ariza.undip@gmail.com

Abstract

Etimologically, the term of welfare state consists of two words welfare and state. Welfare means prosperity or safety, and state is defined as an agency of the society that having a power to control the relation of people and produce the symptoms of power within the society. The term of welfare state is often called in bahasa as negara kesejahteraan. The term of welfare state was used in English by Archbishop York from UK in 1940 as the response and resistance of warfare state from Nazi Hitler in Germany. Welfare state was conducted firstly in Europe and US. This program has been conducted to improve the economic system of capitalism more compassionate and to protect the weak within the society as the result of "wickedness" of capitalism. However, the program of welfare state, as time goes by, that has been conducted by capitalism has not worked to create prosperity for the people. The poverty and injustice are still happening until now. These are happening since the misleading of capitalism that only focuses on the increase economic development towards the existence of state creating social prosperity within the society. Therefore, besides material development, Islamic welfare state also focuses on the moral material aspect without followed by spiritual uplift. It is different from Islamic welfare state that gives the interrelated comprehensive concept. This linkage consists of the roles of state and religion to aspect as a social control for the human prosperity.

Keywords: *Welfare State, Capitalism, Islam*

PENDAHULUAN

Problem ekonomi merupakan suatu problem yang universal di mana seluruh dunia menaruh perhatian kepada masalah ini. Karena perhatiannya ini, sistem ekonomi menjadi maju dan berkembang dengan pesat. Perkembangan sistem ekonomi ini dengan segala kedahsyatan rekayasa teknologi tidak bisa dilepaskan dari peran dan kreatifitas teknokrat-teknokrat ekonomi kapitalisme. Dasar filosofi pemikiran ekonomi kapitalis ini bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776 (Smith, 1937). Dalam bukunya ini Smith berpendapat bahwa:

Produksi merupakan sumber utama kekayaan suatu negara, yaitu hasil kerjasama tenaga kerja manusia dan sumber-sumber daya. Dengan meningkatnya ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja maka kekayaan akan bertambah sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi.

Manusia melakukan kegiatan ekonomi atas dasar dorongan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bergerak sebagai tenaga pendorong manusia untuk mengerjakan apapun asalkan masyarakat bersedia membayar.

Setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah (*Laissez faire*). Untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat, maka individu seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak (*invisible hand*).

Dasar-dasar filosofi Smith ini kemudian menjadi sistem ekonomi dan telah mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*). Motif kepentingan individu kapitalistik yang didorong oleh filsafat liberalisme telah melahirkan sistem ekonomi pasar bebas. Kapitalisme ini kemudian memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi. Sistem ini juga mengakibatkan munculnya banyak komentar yang menggugat kemampuan dari sistem pasar bebas ini dalam menjawab tantangan global.

Gugatan-gugatan yang dimunculkan oleh para pengamat ini bukannya tanpa sebab, akan tetapi didasari pada permasalahan-permasalahan yang muncul bagi perkembangan aktifitas hidup manusia dari sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa hal tersebut antara lain:

Sistem kapitalis sangat mengagungkan produksi sebagai kekuatan dalam menentukan kompetisi sehingga para produsen yang paling unggul akan bertahan hidup, sedangkan yang lemah dan tidak mampu bersaing akan tersingkir.

Sifat-sifat kapitalisme telah melahirkan beberapa ciri yang kontraproduktif seperti: Menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia, dan pengambilan bunga, Faktor-faktor ekonomi dikuasai dan didominasi oleh setiap individu, Pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan atas berbagai kegiatan ekonomi termasuk dalam politik negara, Mayoritas barang produksi yang dihasilkan dengan transaksi riba dan iklan yang berlebihan, Kapitalisme identik dengan monopoli karena kecenderungan pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya.

Akan tetapi, sistem kapitalisme yang dianggap banyak orang telah melakukan berbagai tindak kejahatan moral ternyata sistem ekonomi kapitalis juga telah melahirkan suatu program *welfare state* (negara kesejahteraan). Program dari negara kesejahteraan ini bertujuan untuk mengangkat kondisi warga negara yang lemah agar tetap bertahan hidup dan menikmati kesejahteraan masyarakat kapitalis.

Terminologi *Welfare State* pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1941 untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu (Naqvi, 2003). *Welfare State* atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Akan tetapi antara tujuan dan praktek dari program negara kesejahteraan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan tidaklah semulus dengan yang direncanakan. Ketidakseimbangan ekonomi global, kemiskinan, pengangguran yang disertai dengan kejahatan telah melanda di hampir seluruh penjuru dunia. Konsep, doktrin, program negara kesejahteraan bisa dibilang gagal dalam mengantarkan umat manusia ke arah terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan.

Ariza
Fuadi

Kegagalan ini bisa dibalang karena menurut paham kapitalisme, yang dimaksud dengan kesejahteraan hanya bersifat material semata. Material ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi setiap individu, penghapusan kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat. Hal ini ternyata juga tidak seluruhnya berhasil, meskipun pada umumnya bisa dibalang mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi rakyatnya, karena ternyata tidak seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesejahteraan sosial yang memadai. Sedangkan kesejahteraan spiritual tidaklah berada dalam konsep dari doktrin paham kapitalisme yang membawa pada ketenangan dan kebahagiaan hidup, serta kedamaian. Akibatnya, paham kapitalisme ini lebih mengedepankan tujuan duniawi semata dan tidak memikirkan dari tujuan ukhrawi.

Meskipun kapitalisme dianggap lebih unggul dalam hal kinerja ekonomi, akan tetapi pemenuhan kesejahteraan material bagi seluruh penduduknya belumlah sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat dari ketidakstabilan ekonomi dunia yang tercermin pada tingkat inflasi dan tingginya pengangguran di negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan tingginya kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin. Sementara itu, di negara-negara berkembang terjerat beban hutang luar negeri yang semakin mengakibatkan pembangunan di segala bidang terhambat karena teralokasi pada pembayaran beban hutang tersebut.

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya dipandang sebagai suatu doktrin semata. Akan tetapi mencakup pandangan hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan keukhrowian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang. Di Barat dan bahkan di negara muslim sendiri telah melupakan bahwa ada satu sistem yang bisa menjadi alternatif, yaitu sistem negara kesejahteraan Islami (*Islamic welfare state*).

Sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Secara implisit dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan riba mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Sebagaimana sejarah menyaksikan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kehadiran negara diperlukan untuk menjamin setiap warganya mampu memenuhi kebutuhan hidup standar. Sebagaimana dipesankan Nabi Muhammad SAW, "Setiap penguasa yang bertanggungjawab mengatur urusan-urusan Muslim, tetapi tidak berjuang dengan keras dan amanah bagi kesejahteraan mereka, tidak akan masuk surga bersama mereka."

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Selain sebagai ajaran normatif, Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup

(*World View*) bagi segenap para penganutnya. Dari hal ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan yang sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.

Sistem ekonomi Islam ini sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistem-sistem dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam adalah bukan semata-mata bersifat materi semata. Akan tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

Dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman dalam semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, bidang usaha, ataupun pasar. Terintegrasikannya dimensi iman dalam setiap aktifitas manusia akan merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian secara makro. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep Islam mengenai negara kesejahteraan sebenarnya berbeda dari gagasan yang dicetuskan sebelumnya. Karena konsepnya begitu komprehensif, negara kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya sebagian daripadanya (Mannan, 1997).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menelaah kembali konsep negara kesejahteraan menurut kapitalis dan Islam yang dipandang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga kemudian dapat dimunculkan konsep negara kesejahteraan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan peradaban tersebut tanpa merusak tatanan dari ajaran Islam.

Pengertian Negara Kesejahteraan

Definisi negara kesejahteraan (*welfare state*) sangatlah luas dan beragam. Di satu sisi definisi negara kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. Pekerjaan adalah sumber pendapatan rakyat, jika negara dapat menyediakan pekerjaan secara penuh maka kemiskinan rakyat akan berkurang dan rakyat akan sejahtera. Secara etimologis istilah negara kesejahteraan ini dapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan jaminan berupa tunjangan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan oleh negara, pensiun atau tunjangan hari tua, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya (Pass dan Lowes, tt).

Secara singkat, istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Husodo, 2006). Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara yang dimaksud di sini adalah suatu *agency* (alat) yang mengatur

Ariza
Fuadi

16

suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia.

Wujud dari komitmen negara kesejahteraan adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh negara untuk mendukung para keluarga. Beberapa program kesejahteraan antara lain, pemberian pensiun kepada orang lanjut usia, skema asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, makan di sekolah, pengawasan terhadap defisiensi mental, penanganan kelahiran dan pengasuhan ibu dan bayi.

Marshal mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis (Soule, 1994). Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta beberapa negara-negara bagian di Eropa Barat dan Utara adalah negara-negara yang termasuk dalam kategori ini. Sedangkan negara-negara bekas Uni Soviet dan "Blok Timur" tidaklah termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak termasuk negara-negara demokratis maupun kapitalis.

Hal ini menjadi menarik karena dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dianggap sebagai 'penawar racun' bagi kapitalisme dari dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, negara kesejahteraan sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (*compassionate capitalism*) (Suharto, 2006).

Menurut Esping-Andersen, negara kesejahteraan bukanlah suatu konsep yang menggunakan pendekatan baku. Negara kesejahteraan pada umumnya diidentikkan dengan ciri-ciri yang mengikutinya yakni pelayanan dan kebijakan sosial yang disediakan oleh negara kepada warganya, seperti pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan. Sehingga keduanya antara negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering diidentikkan bersama. Akan tetapi pada dasarnya kuranglah tepat karena kebijakan sosial tidaklah mempunyai relasi biimplikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan dengan tanpa adanya negara kesejahteraan, sedangkan negara kesejahteraan akan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya (Esping-Andersen, 1990)

Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Dengan syarat-syarat ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas, tidak semua negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (Esping-Andersen, 1990; Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial

sebagai “penjaminan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis (Husodo, 2006). Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Sejarah Negara Kesejahteraan

Sejarah dari munculnya negara kesejahteraan pada umumnya dijelaskan dalam tahun yang berbeda-beda. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tersebut menunjukkan tentang munculnya negara kesejahteraan baik dari segi gagasan maupun implementasinya tertuju pada pertengahan abad XX, setelah terjadi *great depression*. Gagasan dari negara kesejahteraan pada awalnya sebagai terminologi yang menunjukkan suatu praktek negara dalam melakukan kebijakan makro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Haedar Naqvi, pada tahun 1941 terminologi *welfare state* digunakan dalam bahasa Inggris untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu (Naqvi, 2003). Pada tahun 1940an istilah *welfare state* dimunculkan pertama kali oleh Uskup Agung York di Inggris sebagai antitesis atas program *warfare state* (negara perang) di Jerman oleh rezim Nazi Hittler yang sedang memperluas wilayahnya. Negara kesejahteraan atau rezim kesejahteraan (*welfare regime*) lebih dari sekadar kebijakan sosial (Bahagijo, 2006).

Perkembangan *welfare state* di Eropa Barat pada umumnya sangat terpengaruh dan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kaum buruh. Dari perjuangan buruh itulah masyarakat di negeri-negeri ini mendapatkan berbagai fasilitas murah dan gratis serta tunjangan sosial dari negara. Sebelum Perang Dunia I, cikal bakal *welfare regimes* dimulai oleh tokoh-tokoh karismatis dan otoritarian, seperti Bismark (Jerman), Von Tappe (Austria), dan Napoleon III (Perancis), dengan melansir jaminan-jaminan sosial untuk pegawai pemerintah dan kelompok pekerja industri. Di Inggris sistem *welfare* diawali sekali dengan lahirnya UU Penanggulangan Kemiskinan (*Poor Law-1880-an*). Dalam periode kedua, sesudah Perang Dunia II, 1945-1990, *welfare state* merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau kebijakan (koalisi) partai politik yang memerintah untuk menciptakan warga negara dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi (Bahagijo, 2006).

Dalam tulisannya, Edi Suharto menjelaskan bahwa pertama-tama negara kesejahteraan dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad XIX yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi

Ariza
Fuadi

18

(compassionate capitalism). Keberadaan sistem welfare state tersebut berakibat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi golongan lemah dalam masyarakat (Suharto, tt).

Welfare state menurut John Maynard Keynes dibentuk dengan tujuan untuk mencapai aspek full employment. Keynes menekankan kepada pemerintah agar dominan dalam semua manajemen permintaan efektif melalui kebijakan fiskal. Akan tetapi di sini Keynes tidak memberikan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi. Aspek full employment ini merupakan bentuk penolakan Keynes terhadap teori Adam Smith bahwa full employment dijamin secara otomatis (*invisible hand*) (Klein, 1954).

Negara Kesejahteraan dalam Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat tujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai ajaran normatif, Islam memiliki peran sebagai pandangan hidup bagi seluruh penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja memiliki suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan duniawi maupun ukhrowi.

Menurut Chapra, negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu program yang berkaitan dengan kebijakan makro dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu:

Basic Imperatives

Kesejahteraan dalam Islam dapat tercapai melalui prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan. Cara pandang Islam yang dalam hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan masyarakat tidaklah dapat dipahami tanpa sebuah komunitas yang terorganisir dan diatur sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri dengan tegas mengutuk sebuah kekacauan dan anarkisme seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 205 dan Nabi juga menekankan akan perlunya suatu otoritas dan aturan dalam sebuah masyarakat Muslim.

Ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya suatu otoritas dan organisasi sangatlah mempengaruhi pola pikir politik para tokoh muslim dunia. Beberapa tokoh Muslim dunia, sebagai contoh, Abu Ya'la dan Al-Mawardi, dua ulama kontemporer dari Baghdad ini menerangkan bahwa karakteristik suatu negara yang ideal adalah negara yang mempraktekkan kedaulatan dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Lebih lanjut Al-Mawardi menyatakan bahwa keberadaan seorang *imam* atau pemimpin sama pentingnya dalam memperjuangkan kebenaran dan akuisisi ilmu pengetahuan. Bahkan Ibn Khaldun secara lebih tegas menekankan bahwa pelebagaan dalam suatu negara merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dan dikelola oleh setiap muslim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah, Syah Waliyullah, dan beberapa tokoh Muslim dunia (Chapra, 1979).

Oleh karenanya, Islam memandang suatu negara merupakan sebuah instrumen dalam rangka untuk merealisasikan tujuan-tujuan pokok suatu negara. Melalui kedaulatan inilah tujuan-tujuan suatu negara tersebut dapat terealisasi. Akan tetapi Islam memandang bahwa kedaulatan tersebut tidaklah absolut. Apapun dan dalam bentuk apapun kedaulatan ini pada hakikatnya merupakan mutlak milik Allah Swt. Orientasi kedaulatan dalam sebuah

negara haruslah sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak boleh hanya menurut kehendak rakyat banyak. Kedaulatan ini diwujudkan dalam aturan-aturan Tuhan (*Divine Law*) yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan utusanNya dan diterapkan oleh Nabi dalam Sunnah sebagai misi kenabian.

Misi kenabian ini mengarah pada suatu komitmen atau tanggung jawab untuk meraih kesejahteraan umat manusia yang didefinisikan dalam al-Qur'an bahwa nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi semua manusia. Secara eksplisit, dalam ayat-ayat al-Qur'an, kerahmatan Nabi banyak diterangkan dalam berbagai ragam seperti *hayātan thayyibatan* (*fostering of good life*) dan juga *falah* (*welfare*), ketentraman, kemudahan dalam hidup bernegara, generasi yang sejahtera, dan lain sebagainya. Nash dalam al-Qur'an, Hadits, dan tulisan para ilmuwan Muslim tentang fungsi negara kesejahteraan dalam negara Islam (*Islamic State*) sangatlah ditekankan dan diutamakan oleh Nabi.

Selain itu sistem politik Islam juga telah mengklaim berorientasi pada kesejahteraan manusia. Hanya saja perbedaannya terletak pada dasar filosofis yang menyangkut pada kesejahteraan manusianya. Dalam hal ini Islam membedakan secara jelas dan khas perbedaan mendasar tersebut secara komprehensif dan konsisten dengan konsep *human nature*. Seseorang manusia tidak hanya diciptakan dari *matter* tetapi juga dihembuskan di dalamnya dengan *Divine Spirit* (spirit ketuhanan).

Matter dan *Divine Spirit* ini secara bersamaan tertanam pada setiap makhluk Allah Swt yang memiliki kebebasan sendiri, tetapi tetap harus selalu bertanggung jawab dan merespon dalam setiap perbuatannya dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk Allah Swt (*Divine Guidances*) untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kewajiban bagi setiap manusia adalah menjalankan setiap perintahNya sebagai wakil Allah di muka bumi.

Sebagai agama, Islam telah menekankan secara komprehensif tentang nilai-nilai moral, sehingga sebuah negara Islam tidak dapat dilepaskan dari etika dalam bermasyarakat sebagai wujud yang responsif bahwa *Islamic Welfare State* menciptakan spirit moral-religius dan kesejahteraan warga. Para pemikir politik dan hukum Islam harus menekankan makna moral dalam Islam pada setiap kebutuhan untuk membuat peraturan-peraturan atau perundang-undangan dalam suatu negara guna menciptakan tatanan yang Islami. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa negara Islam adalah polisi negara yang memaksa jalan hidup atau pola hidup seseorang dengan kekuatannya kepada aturan-aturan tertentu.

Dalam merealisasikan nilai-nilai spritual Islam ke dalam setiap individu dan masyarakat, negara haruslah berusaha dalam tiga pedoman utama. *Pertama*, negara haruslah mengembangkan kondisi-kondisi yang kondusif dalam penciptaan keadaan rumah yang menanamkan kepedulian dan kesetiaan terhadap moral-moral Islam pada generasi selanjutnya. *Kedua*, negara Islam haruslah membentuk sistem pendidikan dalam bentuk yang Islami sehingga institusi pendidikan dapat menghasilkan generasi yang memiliki idealisme Islam. Dan *terakhir*, negara seharusnya menekankan norma-norma dan nilai-nilai Islam tersebut yang sesuai dengan aturan perundangan dan membentuk aturan yang dapat menghukum bagi setiap pelanggaran sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pencegah dalam setiap pelanggaran (Chapra, 1979).

Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang halal merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan spiritual, selain dari pemenuhan kebutuhan material. Oleh karena itu, di samping

Ariza
Fuadi

20

menyiapkan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan spiritual umat manusia melalui para nabiNya, Allah Swt juga menyediakan sumber-sumber daya alam bagi kehidupan material umat manusia.

Terdapat dua prinsip fundamental dalam sumber daya, yaitu:

Sumber daya yang diberikan oleh Allah Swt diperuntukkan kepada setiap umat manusia dan tidak dibeda-bedakan ke dalam grup atau kelas tertentu.

Sumber daya tersebut diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia secara umum, setidaknya dalam bentuk usaha untuk penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan material dasar semua manusia (Chapra, 1979).

Fungsi-Fungsi Ekonomi

Negara Islam atau yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dapat bertindak untuk membuat kebijakan-kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi untuk memaksimalkan fungsi ekonomi secara komprehensif dalam bingkai kesejahteraan sosial. Spesifikasi elemen-elemen dasar fungsi-fungsi ekonomi dalam negara kesejahteraan menjadi sangatlah penting. Berikut ini merupakan elemen-elemen dasar atas fungsi-fungsi tersebut.

Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Sumber ekonomi yang terdapat di muka bumi ini merupakan karunia dan amanah dari Allah Swt kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk mengelolanya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini berimplikasi kepada setiap manusia untuk: *pertama*, berusaha melakukan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan semua kebutuhan dasar manusia; *kedua*, pemanfaatan secara penuh dan efisien terhadap seluruh sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum dan meningkatkan standar hidup manusia; dan yang *terakhir*, menghindari kondisi-kondisi yang membangkitkan pengurangan atau kelebihan permintaan dan mengarahkan kepada peningkatan pengangguran atau inflasi.

Stabilitas nilai uang riil

Salah satu permasalahan yang cukup serius di era kontemporer ini adalah terjadinya inflasi yang terus menerus diikuti dengan turunnya nilai riil dari mata uang dan aset moneter. Stabilitas nilai mata uang merupakan sesuatu hal yang harus menjadi tujuan utama tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga untuk keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Chapra, salah satu hal yang dapat menekan tingkat inflasi adalah dengan mengontrol harga dan subsidi pada bahan makanan dan barang-barang pokok yang dikonsumsi (Chapra, 2000).

Hukum dan Tata Tertib

Hukum dan tata tertib merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan fungsi negara untuk mengatur dan melindungi masyarakat berkenaan dengan perlindungan hidup dan hak miliknya. Hukum dan tata tertib di sini merupakan determinan utama dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta kebahagiaan dan kesejahteraan setiap individu.

Keadilan Sosial dan Ekonomi

Dalam Islam, setiap Muslim adalah bersaudara satu sama lain tanpa membedakan aspek kaya miskin, hitam putih, dan lain sebagainya. Hal yang menjadi pedoman dasar perbedaan di mata Allah hanyalah keimanan, karakter, dan hubungan manusia secara horizontal dan vertikal. Ajaran Islam ini bagi setiap orang di masyarakat tidaklah akan ada maknanya kecuali jika diikuti dengan keadilan sosial sehingga setiap orang akan memperoleh giliran untuk berkontribusi kepada masyarakat dan tidak dieksploitasi oleh masyarakat lain.

Keadilan sosial ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam yang didasarkan pada konsep keadilan dan persaudaraan atau *ukhuwah* (Chapra, 1997). Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang dalam penerapan sistemnya untuk pemerataan pendapatan dan keadilan sosial ekonominya tidak didasarkan pada landasan spiritual dan persaudaraan.

Perlindungan Sosial dan Keadilan Distribusi

Mengingat komitmen Islam dalam persaudaraan sesama manusia dan keadilan sosial dan ekonomi, ketidakadilan dalam pendapatan dan kesejahteraan hanyalah akan merusak *spirit* Islam itu sendiri. Ketidakadilan semacam ini akan lebih merusak daripada membantu perkembangan rasa persaudaraan seperti yang ajaran Islam harapkan. Hal ini dikarenakan bahwa semua sumber daya alam diberikan Allah Swt kepada seluruh makhluk, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakannya di antara beberapa golongan.

Oleh karenanya Islam menekankan keadilan distribusi dan menggabungkannya ke dalam agenda-agenda untuk redistribusi pendapatan dan kesejahteraan sehingga setiap individu terjamin standar hidupnya. Keadilan distribusi ini tidaklah dapat diartikan bahwa setiap individu menerima kekayaan dan pendapatan negara secara sama rata. Keadilan ini harus disesuaikan dengan kontribusi seseorang kepada negara. Berkaitan dengan ini, Islam sangatlah toleran terhadap ketidaksamaan pendapatan karena semua manusia diciptakan tidak sama dalam karakter, bakat, dan jasanya kepada Negara (Chapra, 1979).

Hubungan Internasional dan Pertahanan Nasional

Dengan meningkatnya perkembangan umat Muslim di seluruh dunia, negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakatnya yang berkaitan dengan peningkatan spiritual dan material umat. Jika sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, sudah seharusnya negara mampu mengurangi kesulitan dan meningkatkan pengembangan dalam pelayanan di seluruh negara.

Prinsip-prinsip dalam kebijakan tersebut dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut: Kooperatif terhadap semua kontribusi kebajikan dan kesalehan serta menahan diri dari perbuatan dosa dan bekerja secara positif untuk kesejahteraan umat karena semua orang adalah keluarga besar Tuhan.

Kedua hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus ada untuk semua hubungan antar negara dan antar masyarakat yang hidup dalam negara Islam dengan segala tanggung jawab yang universal. Negara-

Ariza
Fuadi

22

negara Muslim memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan ideologi keislamannya, solidaritas yang lebih besar dan kooperatif di semua lapangan untuk meningkatkan persatuan, martabat umat, dan kebesaran Islam. Masing-masing negara juga bertanggungjawab untuk mempromosikan misi perdamaian dan pertahanan (Chapra, 1979).

Penyediaan Sumber Daya

Berbagai sumber daya yang dapat dijadikan persediaan dalam mencapai kesejahteraan suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok zakat, pendapatan dari sumber daya alam, pajak, dan pinjaman luar negeri. Zakat adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam semua penataan jaminan perlindungan sosial. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa bila zakat diperkenalkan, maka semua penataan jaminan sosial tidak diperlukan lagi. Anggapan ini tidak berdasar dan salah sasaran karena zakat bukan merupakan pengganti dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan. Zakat ini tidaklah menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan melainkan hanya membantu untuk menggeser tanggung jawab ini kepada masyarakat (Chapra, 2001)

Kelompok sumber daya persediaan yang lain adalah pendapatan dari sumber daya alam itu sendiri yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh penduduk. Sedangkan negara wajib mengelola pendapatan-pendapatan tersebut dan tidak boleh diselewengkan atas nama individu atau kelompok. Di samping itu, pajak sebagai sumber daya yang lain haruslah dirancang secara modern. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur sosial dan fiskal secara besar-besaran, percepatan pembangunan akan dapat terealisasi dengan baik dengan sumber pendapatan pajak yang mencukupi. Sedangkan sumber daya yang lain adalah dari pinjaman luar negeri bagi negara-negara muslim di saat terjadi defisit fiskal. Keempat jenis kelompok persediaan inilah yang diperlukan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya (Chapra, 1979).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa setiap negara Islam wajib melakukan program negara kesejahteraan secara komprehensif sehingga terjadi relasi antara politik dengan ekonomi dengan merujuk pada aturan-aturan Islam, sehingga tercipta kesejahteraan umat. Sehingga negara kesejahteraan Islam ini tidak dapat hanya dideskripsikan dari aspek dan program kebijakan ekonomi saja, sebagaimana program negara kesejahteraan kapitalis, tetapi juga meliputi pada aspek spiritual agar tercipta kesempurnaan Islam dalam menciptakan kesejahteraan umat baik di dunia dan di akherat.

Negara Kesejahteraan dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme.

Kapitalisme berarti kekuasaan ada di tangan kapital, yakni suatu sistem ekonomi yang bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan. Kapitalisme dapat dideskripsikan sebagai kekayaan yang digunakan dalam memproduksi lebih banyak kekayaan dan kapitalisme itu sendiri merupakan suatu sistem yang mengarahkan pada proses tersebut (Mahmud, 1947).

Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada hak kepemilikan pribadi (swasta) atas segala jenis harta benda dan kebebasan setiap individu untuk mengadakan kontrak (persetujuan) dengan individu-

individu yang lain. Setiap individu tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonominya bagi keuntungan dan kesejahteraan masing-masing individu tersebut. Lebih jauh lagi, kegiatan usaha atau ekonomi masing-masing individu ini merupakan nafas dari kapitalisme itu sendiri. Ia memungkinkan kebebasan mutlak untuk memilih salah satu dari ribuan lowongan sebagai upaya produktif dan komersial.

Kebebasan berekonomi dari kaum kapitalis ini terimplementasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi seperti kepemilikan, eksploitasi, konsumsi dan lain sebagainya (aṣ-Ṣadr, 1994). Pemerintah membuat undang-undang tentang kepemilikan swasta dan kebebasan dalam mengadakan kontrak hanya dengan maksud melindungi kepentingan bersama (Wirasasmia, 2002). Menurut Marshall, pemerintah dan warga negaranya haruslah berusaha memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya sebagai kewajiban kolektif melalui lembaga negara tersebut (Harris, 1999).

Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat tiga unsur yang penting, yaitu pengutamaan kepentingan pribadi (individualisme), persaingan (kompetisi pasar), dan pengerukan keuntungan. Individualisme ini kemudian telah menciptakan karakter manusia sebagai seorang individu-individu di luar sistem atau bagian dari masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan masyarakat kapitalis merupakan suatu arena bagi para individu tersebut dalam berkompetisi satu sama lain dalam persaingan yang ketat. Dalam kompetisi ini berakibat bagi yang kuat akan tetap hidup dan bertahan, sedangkan bagi yang lemah dan tak berdaya akan terinjak dan termusnahkan.

Sehingga setiap individu baik itu berupa perseorangan, perusahaan atau bahkan suatu bangsa harus berjuang untuk kemajuan dan kepentingannya sendiri. Setiap individu ini berhak untuk menggunakan barang-barang ekonomi yang diperolehnya, bebas melakukan apapun dengan harta kekayaannya tersebut selama tidak mengganggu kegiatan dan hak orang lain. Kepentingan individu dan sistem persaingan bebas (free fight liberalism) sangatlah erat dalam sistem kapitalis ini. Hal ini kemudian berimplikasi untuk memotivasi pada setiap individu untuk meningkatkan agar aktiva produksinya maksimal. Distribusi kekayaan dan pendapatan sangat dipengaruhi oleh pihak swasta karena setiap individu diperbolehkan untuk menghimpun aktiva secara mutlak, dan hak milik swasta memungkinkan laju pertukaran yang tinggi atas hak pemilikan barang-barang.

Pemilik kekuatan modal (modal capital) secara efektif dan efisien akan dapat dengan mudah memenangkan persaingan dalam bisnis. Persaingan ini dianggap sebagai faktor pendorong utama untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Persaingan ini juga sangat dibenarkan untuk dilakukan secara lebih bebas dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Produksi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kekuatan suatu individu. Para produsen yang memiliki keunggulan lebih akan sanggup bertahan dalam persaingan, sedangkan produsen yang lemah dan tidak mampu bersaing akan tersingkirkan.

Dalam sistem ini tidak ada kepedulian bahwa yang tersingkirkan dalam kompetisi pasar dan terjerat dalam kemiskinan adalah manusia. Kapitalis lebih mementingkan tentang pertumbuhan ekonomi dan barang-barang produksi semata. Oleh karena itu, mentalitas kaum kapitalis tidak merasa memiliki tanggung jawab moral dan hati nurani atas masyarakat tertindas akibat kapitalisme.

Ariza
Fuadi

24

Di era modern ini, kapitalisme dicirikan dengan penggunaan modal yang secara besar-besaran dalam melakukan produksi dan kebebasan besar dalam berusaha serta perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang berbentuk perseroan tumbuh dan berkembang. Kapitalisme modern ini sering dikedam dan bahkan dituding sebagai penyebab ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat, karena kaum produsen cenderung mengeksploitir kaum buruh. Pemerintah di sini hanya memiliki peran yang relatif kecil dalam kehidupan perekonomian. Pemerintah hanya memiliki fungsi utama untuk menyusun dan menegakkan peraturan-peraturan, mencegah penyelewengan dan kekeliruan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dapat diakomodir sendiri oleh pemerintah untuk memperoleh laba yang pantas daripada dikerjakan oleh pihak swasta.

Dengan kata lain, negara hanya berperan untuk menjamin mekanisme pasar berjalan lancar dan campur tangan negara yang terlalu besar dianggap hanya akan mengganggu beroperasinya pasar. Oleh karena itu, dalam situasi yang tanpa campur tangan pemerintah atau negara seperti ini, kapitalisme mudah terjatuh ke dalam sikap arogansi ekonomi, manusia saling menyerang satu sama lain, dan hedonisme yang melihat manusia dimana motivasi, kebutuhan dan kesenangannya hanya mengejar pemuasan fisik-materi.

Patokan tindakannya akan bercorak utilitarianistik yaitu asas untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Sehingga pada praktiknya, asas ini sering berubah maknanya menjadi konsumerisme-materialisme dengan melakukan penindasan terselubung kepada pihak yang lemah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan diutamakan, sementara solidaritas, efektifitas, dan kesetaraan ditiadakan (Suharto, tt).

Sehingga dapat dipahami bahwa program negara kesejahteraan yang dicetuskan dalam sistem ekonomi kapitalisme seakan menemukan momentumnya. Sistem ekonomi kapitalisme yang penuh dengan pemahaman dan praktek individualisme menjadi sebuah program yang memberikan kesan positif untuk menyeimbangkan antara individu sebagai faktor utama dalam proses ekonomi yang pada kenyataannya tidaklah meninggalkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ketidakseimbangan ekonomi global, kemiskinan, pengangguran yang disertai dengan kejahatan dapat dibilang melanda di hampir seluruh dunia. Program negara kesejahteraan ini hanyalah merupakan sebuah ideologi, sistem dan strategi yang jitu untuk mengelabui dampak negatif sistem ekonomi kapitalis (Suharto, 2001).

Hal ini senada dengan apa yang dicetuskan oleh pemikir sosialis Jerman Robert Heilbroner bahwa negara kesejahteraan merupakan sebuah ideologi, sistem dan sekaligus strategi yang jitu untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme. Menurutnya, kapitalisme di masa depan memang tidak lagi dapat dilawan dan sudah seharusnya tidak diarahkan untuk merombak secara total sistem ini, melainkan lebih diarahkan untuk mengubah sistem yang maju ini agar lebih berwajah manusiawi (*compassionate capitalism*) dalam mengatasi akibat mekanisme pasar yang tidak sempurna (Heilbroner, 1976). Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Sudah seharusnya ketidakadilan pasar dikurangi oleh lembaga negara untuk menjamin stabilitas sosial dan menghilangkan dampak-dampak negatif dari kapitalisme. Sistem negara kesejahteraan ini merupakan sebuah kompensasi yang harus dibayarkan oleh para elit penguasa dan pekerja untuk menciptakan

stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan ini pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam menanggapi konsekuensi-konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalisme.

Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of socioeconomic development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dengan APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam kebijakan pengelolaan nationstate-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan.

Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran.

Akan tetapi pada kenyataannya, program negara kesejahteraan yang didengungkan oleh kaum kapitalis bisa dibilang gagal dalam mengantarkan umat manusia ke arah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Kegagalan ini bisa dibilang karena disebabkan oleh pemahaman negara kesejahteraan menurut kapitalisme hanyalah bersifat material semata yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar manusia bagi setiap individu, penghapusan kemiskinan, adanya lapangan pekerjaan yang memadai serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan kesejahteraan secara spiritual tidaklah diperhatikan sama sekali atau tidak termasuk dalam doktrin negara kesejahteraan yang membawa pada ketenangan, kebahagiaan hidup, serta kedamaian. Paham kapitalisme ini hanya berkuat pada urusan duniawi semata.

Perbandingan antara Negara Kesejahteraan Menurut Islam dan Kapitalisme.

Dapat kita pahami bahwa masing-masing sistem, baik Islam maupun kapitalisme, memiliki karakteristik tersendiri satu sama lain. Tentunya karakteristik dari masing-masing sistem terdapat persamaan maupun perbedaan tentang program negara kesejahteraan ini. Beberapa perbandingan yang mendasar dari program negara kesejahteraan Islam dan Kapitalisme adalah:

Pertama dan yang paling mendasar adalah bahwa program negara kesejahteraan kapitalisme memiliki landasan filosofi yang bersifat sosialis, dimana sistem ekonominya lebih mengutamakan aspek sosial yang memfungsikan suatu negara untuk memberikan tunjangan jaminan sosial yang luas. Akan tetapi hal ini cenderung kontradiktif dengan landasan filosofi dari sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Sistem ekonomi kapitalisme memiliki pandangan filosofi yang bersifat individualis atau mengutamakan kepentingan pribadi dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak (Chapra, 2000).

Ariza
Fuadi

Individualisme ini kemudian telah menciptakan karakter manusia sebagai seorang individu-individu di luar sistem atau bagian dari masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dalam filsafat ekonomi kapitalisme misalnya, yang menjunjung tinggi prinsip *laissez-faire*, dimana setiap orang diberi kebebasan melakukan tindakan ekonomi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sehingga memunculkan lahirnya prinsip *survival of the fittest* (Abbas, 2008).

Sebagai contoh, pada tahun 1920an di Amerika, ketika pasar modal di Amerika menjadi suatu tujuan investasi favorit karena dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih dibandingkan deposito perbankan. Bahkan, perbankan sendiri turut andil dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya di pasar modal. Akibatnya, sektor riil tidak bergerak karena tidak terdapat dana sebagai sumber utama penggerakannya. Aliran dana tersebut mengalir ke pasar modal sebagai pasar sekunder yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil selepas penjualan saham awal. Keuntungan pasar modal terus meningkat sedangkan perekonomian riil tidak dapat berjalan. Investor pun mulai resah dan ancaman inflasi mulia nampak di depan mata.

Pada tahun 1929, akhirnya pasar modal Wall Street di New York bangkrut sehingga terjadi peristiwa yang kemudian dikenal dengan istilah the Great Depression (Depresi Besar). Dampak dari peristiwa ini menyebabkan perekonomian Amerika secara total mengalami penurunan yang diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi *Laissez Faire* pun tidak mampu menahan laju peningkatan hilangnya lapangan pekerjaan.

Hal ini akan berakibat bagi yang kuat akan tetap hidup dan bertahan, sedangkan bagi yang lemah dan tak berdaya akan terinjak dan termusnahkan. Sehingga setiap individu baik itu berupa perseorangan, perusahaan atau bahkan suatu bangsa harus berjuang untuk kemajuan dan kepentingannya sendiri. Setiap individu ini berhak untuk menggunakan barang-barang ekonomi yang diperolehnya, bebas melakukan apapun dengan harta kekayaannya tersebut selama tidak mengganggu kegiatan dan hak orang lain. Dengan demikian masing-masing orang hanya akan mementingkan kesejahteraan individu dengan mengabaikan orang lain atau masyarakat luas.

Negara kesejahteraan dalam kapitalisme ini pada dasarnya masih menganut falsafah *sekularisme* dan *hedonisme*. Meskipun dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai lebih humanis dibandingkan sistem kapitalismenya itu sendiri, akan tetapi ia telah gagal membentuk strategi-strategi yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai indikator kegagalan itu, berbagai data empirik menunjukkan bahwa di negara-negara penganut *welfare state* ala kapitalisme mengalami berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, defisit fiskal, pengangguran, dan lain-lain.

Hal ini senada seperti yang diungkapkan Chapra dengan mengkritisi pada efektifitas enam program negara kesejahteraan yaitu regulasi, nasionalisasi industri, gerakan tenaga kerja yang tinggi, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan full employment yang dianggap telah kehilangan momentumnya (Chapra, 2000).

Regulasi

Dalam regulasi yang dicanangkan oleh pencetus negara kesejahteraan kapitalisme telah terjadi kecenderungan kurang baik kepada kelompok yang menguasai suara politik, media massa untuk berusaha hanya melindungi

kepentingannya sendiri yang berimplikasi pada regulasi yang tanpa nilai. Bahkan regulasi yang terkait dengan kekuatan ekonomi dan organisasi serta sumber-sumber yang tersedia telah menjadi sasaran berbagai kelompok demi kepentingannya sendiri. Hal ini menyebabkan pada ketidakadilan distribusi dan ketidakseimbangan. Regulasi negar-negara kapitalis cenderung hanya menguntungkan orang-orang kaya dan penguasa yang mampu mengontrol media, kampanye dan lobi-lobi politik sehingga regulasi tersebut mendukung kepentingannya.

Nasionalisasi Industri

Program nasionalisasi industri ini pada dasarnya telah kehilangan momentum pada negara-negara kesejahteraan kapitalisme yang pada akhirnya menjadi program privatisasi di Eropa Barat, Cina, Eropa Timur, dan beberapa negara bekas Uni Soviet. Hal ini juga sangat berkaitan dengan kekecewaan publik terhadap kinerja industri-industri tersebut, besarnya subsidi, dan kebijakan politik.

Gerakan Tenaga Kerja

Gerakan tenaga kerja atau gerakan serikat buruh pada dasarnya tidak dapat memberikan bantuan positif dalam peningkatan pendapatan buruh, kondisi kerja, dan rasa keamanan ekonomi. Gerakan serikat buruh hanya dijadikan obyek untuk meningkatkan stabilitas dan prediktibilitas lingkungan ekonomi yang sangat diperlukan dalam akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Fiskal

Menurut Chappra, dalam kebijakan fiskal negara kesejahteraan kapitalisme telah terjadi krisis dalam bidang pengeluaran pemerintah yang tidak terbatas pada golongan miskin saja tetapi juga untuk kepentingan umum; tingkat pajak dan defisit yang tinggi telah menciptakan permasalahan dan struktur keuangan publik yang tidak sehat di semua negara kesejahteraan, sedangkan defisit yang tinggi akan berimplikasi memaksa pemerintah untuk mempertahankan suku bunga yang tinggi sehingga merugikan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan keuangan sehingga menghambat pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan biaya dalam negeri; subsidi yang tidak adil membawa dampak pada terjadinya perlakuan yang sama antara si kaya dan si miskin dalam mengambil manfaat dari pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk subsidi barang dan jasa; pajak progresif yang tidak berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan; dan kesenjangan sosial sebagai akibat dari perlakuan yang sama antara si miskin dan si kaya dalam menikmati subsidi pemerintah dan pajak progresif tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurut Chappra tidak menjamin peningkatan kesejahteraan. Hal ini terbukti bahwa tingkat pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kekayaan yang terus membesar tetap tidak mampu memberantas kemiskinan dan menurunkan ketidakmerataan. Sebagai contoh, di negara-negara terkaya di dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan primer masyarakat miskin khususnya pendidikan, sarana kesehatan dan perumahan.

Ariza
Fuadi

Pengangguran

Di negara-negara kesejahteraan kapitalisme ini, masalah pengangguran tetap menjadi problem utama yang telah menghambat usaha untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Bahkan tingkat pengangguran generasi muda telah meningkatkan rasa permusuhan mereka terhadap masyarakat, dan merugikan kemampuan dan potensi mereka.

Beberapa hal tersebut di atas telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas negara kesejahteraan untuk mencapai tujuannya. Kemerosotan kepercayaan yang meluas terhadap kapasitas negara kesejahteraan untuk mampu mengantarkan sasaran-sasaran seperti tingkat kesempatan kerja atau pelayanan-pelayanan kesejahteraan. Bahkan negara kesejahteraan kini berada dalam kesulitan yang membuatnya tidak dapat menjadi peserta kontes (Anto, 2003). Salah satu penyebab ini adalah ketiadaan suatu norma atau etika kolektif yang dapat menjadi acuan bersama. Sesuai dengan kerangka sekularisme maka negara kesejahteraan cenderung mengabaikan peranan etika dan norma dalam perumusan strategi ekonominya.

Sedangkan filosofi mendasar dalam Islam mengenai negara kesejahteraan adalah bahwa Islam memiliki konsep tawasuth dan tawazun. Tawasuth mengarah pada sebuah ideologi yang berusaha memperjuangkan jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi sosialisme sebagai puncak perjuangan hak-hak politik kewarganegaraan. Sedangkan tawazun adalah menghargai hak-hak dasar masing-masing individu dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan orang banyak.

Kedua, sistem ekonomi kapitalisme tidak dibangun di atas konsep moral. Pada umumnya negara kesejahteraan kapitalisme tidak bertujuan untuk memadukan secara vertikal aspirasi material dan spritual manusia. Hal ini menyebabkan negara kesejahteraan dalam kapitalisme lebih mengedepankan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi melalui pemujaan terhadap materi atau uang semata, tanpa menimbang aspek spiritual. Sehingga kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya bersifat material yakni pemenuhan kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan) bagi setiap warga negara, penghapusan kemiskinan, tersedianya kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan secara adil. Tanpa memperhatikan kesejahteraan spiritual berupa ketenangan batin, kedamaian, dan kebahagiaan hidup.

Dasar dari ajaran Islam itu sendiri dibandingkan dengan kapitalisme terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangannya mengenai ekonomi. Dalam Islam, kewajiban moral sangatlah berpengaruh dalam mengendalikan dan memperkuat tekanan ekonomi. Kalau negara kesejahteraan dalam kapitalisme berusaha untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi semata tanpa memperhatikan peranan moral, maka Islam pada satu sisinya dalam meningkatkan kesejahteraan, menambahkan dimensi rohani pada kegiatan ekonomi (Majid, 2003; Chapra, 1979). Dengan demikian, dalam Islam kemerosotan moral tidak diperbolehkan terjadi hanya demi kesejahteraan ekonomi semata.

Selanjutnya, konsep Islam tentang negara kesejahteraan pada dasarnya berbeda dari konsep negara kesejahteraan yang diusung oleh kapitalisme. Konsep Islam lebih komprehensif, yaitu secara menyeluruh bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia tanpa memandang latar belakang masing-masing individu dan kesejahteraan ekonomi hanyalah sebagian

daripadanya. Konsep Islam ini bukanlah hanya merupakan manifestasi dari nilai ekonomi semata, tetapi juga pada nilai spritual, sosial dan politik Islami. Sedangkan negara kesejahteraan dalam kapitalisme hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata.

Nilai sosial Islam, mengatur perilaku, kehidupan keluarga, tetangga, pengurusan harta kekayaan, anak yatim dan piatu, dan seterusnya. Al-Qur'an memperhatikan perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kekayaan dan lain sebagainya yang menjadi rencana sosial. Tapi tidak satupun dari ketentuan ini yang berlebihan atau memaksakan ketidakmampuan. Tidak ada elemen masyarakat yang memiliki hak istimewa, dimana digambarkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa. Jadi di sini tidak terjadi perlombaan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan harta benda, karena kesejahteraan harta benda bukanlah menjadi ukuran, melainkan orang yang paling bertaqwalah sebagai tanda kemakmuran hidup di dunia dan akhirat.

Selain itu, ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya. Berbeda dengan demokrasi Barat modern, kedaulatan dalam negara Islam adalah milik Allah Swt, sedangkan kedaulatan dalam konsep kapitalisme adalah milik rakyat (Chapra, 1979). Dengan demikian, kepala negara dengan apa yang disebut mayoritasnya dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan keperluannya. Dalam keadaan demikian golongan minoritas atau rakyat kecil, benar-benar berada dalam kekuasaan mayoritas, sehingga tidak berdaya apa-apa di hadapan penguasa pemerintahan. Ini karena yang berkuasa adalah manusia sehingga cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan orang-orang yang berkuasa.

Dan yang terakhir, nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Akan tetapi segala yang ada dan dimiliki oleh setiap manusia merupakan amanah Allah Swt yang harus digunakan untuk setidaknya menciptakan kebaikan hidup manusia dan keadilan sosio-ekonomi (Chapra, 1997). Lebih lanjut, di bawah sistem Islam konsumsi ditetapkan secara berbeda yang ditandai oleh suatu wadah khusus yakni asal dari komoditi tersebut harus jelas kehalalannya dan konsumsi dari komoditi tersebut juga harus digunakan yang oleh Islam tidak dilarang (Chapra, 1970). Sedangkan dalam negara kesejahteraan menurut kapitalisme, konsumsi tidaklah terbatas sehingga semua boleh dikonsumsi.

Hak milik setiap orang mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin. Bahkan hewanpun berhak mendapat bagiannya. Sesungguhnya kewajiban ini dilakukan dengan rasa sukarela yang berlaku bagi semua elemen masyarakat Islam. Ciri kesadaran inilah yang membedakan Islam dengan konsep negara kesejahteraan menurut kapitalisme.

KESIMPULAN

Istilah negara kesejahteraan merupakan terjemahan dari welfare state. Welfare dapat diartikan sebagai kesejahteraan, sedangkan state berarti negara atau suatu alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam suatu masyarakat. Secara lebih luas, negara kesejahteraan dapat dimasukkan dalam kajian ilmu politik dan ekonomi.

Ariza
Fuadi

30

Dalam perspektif politik, negara kesejahteraan adalah suatu negara atau pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan umum (public welfare) melalui berbagai macam program seperti kesehatan, pendidikan, kompensasi pengangguran, jaminan pensiun, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, negara kesejahteraan adalah suatu sistem ekonomi yang mengkombinasikan keunggulan-keunggulan kapitalisme dan sosialisme dalam model penguasaan kepemilikan pribadi yang dipraktekkan suatu pemerintah untuk membuat suatu perundang-undangan tentang program yang luas mengenai kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Negara kesejahteraan dalam Kapitalisme merupakan sebuah ideologi, sistem dan sekaligus strategi yang jitu untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme. Pada tataran teori, negara kesejahteraan ini bisa dibilang mampu menjadi penyeimbang terhadap kehidupan sosial berekonomi di tengah 'kejahatan' Kapitalisme yang sangat mengedepankan perjuangan ekonomi untuk kemenangan dan kepuasan individu. Akan tetapi, program negara kesejahteraan yang didengungkan oleh kaum kapitalis bisa dibilang gagal dalam mengantarkan umat manusia ke arah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Kegagalan ini bisa dibilang karena disebabkan oleh pemahaman negara kesejahteraan menurut kapitalisme hanyalah bersifat material semata, sedangkan kesejahteraan secara spiritual tidaklah termasuk dalam doktrin negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan Islam dengan Kapitalisme tidaklah sejalan satu sama lain. Sistem negara kesejahteraan Islam berusaha menciptakan suatu keseimbangan antara sumber-sumber daya yang langka dan pemakaian-pemakaian atasnya dengan cara yang dapat mewujudkan efisiensi dan keadilan adalah dengan memusatkan perhatian kepada manusia itu sendiri yang berkenaan dengan peningkatan material, moral dan spiritual mereka.

Konsep negara kesejahteraan dalam Islam ini, sayangnya, pada kenyataannya belum sepenuhnya teruji dalam suatu kondisi yang konkrit di suatu negara. Konsep-konsep negara kesejahteraan dalam Islam ini belum memiliki suatu bukti riil tentang keberhasilannya atas korelasi antara kebijakan politik dan ekonomi dalam suatu negara Islam untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip dan tugas-tugas yang mengacu pada norma-norma Islam dalam bingkai negara kesejahteraan Islam pun juga belum menunjukkan keberhasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan.
- Anto, M. B. Hendrie. 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, <http://www.theprakarsa.org/index.php?act=dtlpub&id=20081214174833>, diakses tanggal 8 September 2011.
- Bāqir as-Şadr, Muhammad. 1994, *Iqtisādunā: Our Economics*, vol. 1-part 2, second edition, Iran: World Organization for Islamic Services (WOFIS).
- Chapra, M. Umar. 1970, "The Economic System of Islam (A Discussion of Its Goals and Nature): Part 3", *Islamic Quarterly*, 14:3, Pro Quest LLC.

- _____. 1979, *The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- _____. 1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute.
- _____. 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Esping-Andersen, G. 1990. *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Heilbroner, Robert L. 1976, *Business Civilization in Decline*, New York: WW Norton & Company.
- Klein, Lawrence R. 1954, *The Keynesian Revolution*, New York: Macmillan.
- Mahmud Ahmad, Shaikh. 1947, *Economic of Islam (Comparative Study)*, ed. I, Pakistan: Ashraf Press.
- Majid, M. Nazori. 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: PSEI STIS.
- _____. 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) STIS.
- Mannan, Abdul. 1997, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- _____. 1997, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Naqvi, Haedar. 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith, Adam. 1937, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: The Modern Library.
- Soule, George. 1994, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, Edi. 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cet. ketiga, Bandung: Alfabeta
- _____. tt, "Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial", http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm, diakses tanggal 13 Oktober 2011.
- _____. tt, *Globalisasi, Kapitalisme Dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_08.htm, diakses tanggal 20 Oktober 2011.
- _____. tt, *Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm, diakses tanggal 8 September 2011.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Wirasasmia, HRA Rivai, dkk, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Bandung: Pionir Jaya.

Ariza
Fuadi